



## Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan *Stunting* Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan

Irman Puansa<sup>1</sup>, Darman Syah Pulungan<sup>2</sup>, Yola Nurpaisah<sup>3</sup>, Dita Wahyuni<sup>4</sup>, Ahmad Wahyudi Gultom<sup>5</sup>, Lia Ramadhani<sup>6</sup>

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Email : [irman.puansah@um-tapsel.ac.id](mailto:irman.puansah@um-tapsel.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa terhadap pencegahan stunting di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan, dan untuk mengetahui apasaja hambatan dalam melakukan pencegahan stunting di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kemudian verifikasi dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam melakukan pencegahan Stunting di Desa Pagaran Gala-Gala belum optimal, hal tersebut dikarenakan minimnya strategi serta aksi yang sistematis dalam melakukan pencegahan stunting. Selanjutnya hambatan dalam melakukan pencegahan stunting di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan, antara lain, Bencana *Covid 19* yang melanda Indonesia tidak terkecuali Mandailing Natal, minimnya kebijakan pencegahan stunting, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.

**Kata kunci:** Kebijakan, Pencegahan, Stunting.

### PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak karna menyangkut pertumbuhan anak di Indonesia. Sehingga untuk mewujudkan anak di Indonesia yang sehat dan cerdas, diperlukan langkah awal yang tepat dan paling penting untuk dilakukan adalah pemenuhan gizi pada anak sejak usia dini. Pada dasarnya salah satu penyebab terjadinya masalah kekurangan gizi adalah masalah ekonomi yang ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang dapat menyebabkan rendahnya asupan zat gizi. Selain disebabkan rendahnya asupan zat gizi yang diterima anak sejak dini penyebab lain adalah pola pengasuhan balita yang kurang baik dan buruknya kondisi sanitasi lingkungan dan kurangnya ketersediaan sarana air bersih serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya infeksi yang berulang yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya masalah masalah kurang gizi.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2019, angka stunting di Indonesia sebesar 27,67%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis ketika prevalensi stunting melebihi 20%. WHO juga menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017. Sejauh ini, minat pemerintah dalam mengatasi masalah stunting cukup beralasan, terbukti dengan adanya berbagai langkah untuk menangani masalah stunting. Pedoman tersebut antara lain Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Perpres Nomor 42



Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Inisiatif Gizi, dan *Stunting*, termasuk bantuan lain dalam pengelolaannya. Apalagi, masalah penurunan laju pertumbuhan merupakan bagian dari program prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Ipan, dalam Puji Lestari, dkk 2022)

Terjadinya penyebab permasalahan gizi adalah multifaktor maka upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah kurang gizi tersebut harus melalui pendekatan multisektor. Artinya bahwa penanggulangan masalah kurang gizi tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja tetapi juga dilakukan bersama-sama dengan sektor diluar bidang kesehatan. Sektor lain diluar kesehatan yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah gizi antara lain adalah sektor ekonomi, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pendidikan dan sektor terkait lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pada pasal 6 ayat 2 huruf c, Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk salah satunya "penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;" Berdasarkan laporan *Studi Status Gizi Indonesia* (SSGI), pada tahun 2021 terdapat 47,7% anak usia di bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Mandailing Natal yang mengalami *stunting*. Artinya, hampir separuh balita di kabupaten tersebut mengalami gangguan pertumbuhan hingga tinggi badannya di bawah rata-rata anak seusianya. Daerah Mandailing Natal merupakan terbesar *Stunting* di Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan-permasalahan tersebut jika dibiarkan maka akan meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada balita, hal ini sejalan dengan pendapat Supariasa (2012:87) bahwa : "Balita yang terganggu pertumbuhannya rentan terkena penyakit baik dalam jangka pendek seperti penyakit diare dan penyakit infeksi lainnya maupun dalam jangka panjang seperti nilai IQ anak berkurang 5-10 poin, menurunkan produktivitas pada usia dewasa bahkan beresiko terkena penyakit tidak menular (Diabetes tipe 2, Jantung, stroke, dan sebagainya)". Berdasarkan pendapat tersebut maka perlu adanya kebijakan yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga aparat pemerintah desa dan para petugas yang ditugaskan dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal.

Kebijakan yang berhubungan dengan publik disebut dengan kebijakan publik (Sirajuddin, 2016). Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan stakeholder. Stake holder dalam pembuatan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azas kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Coryanata, 2011). Kekurangan dari sebuah kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan tersebut terlaksana sedangkan keberhasilan dari sebuah kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan. (Desrinelti dkk, 2021)

Pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memiliki luaran berupa aksi, aktivitas, mekanisme dan tindakan yang di bingkai dalam sebuah sistem (Ramdhani and Ramdhani, 2017). Pelaksanaan kebijakan dapat juga diartikan sebagai sebuah aktivitas yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan dilandasi dengan acuan norma yang disesuaikan untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang disepakati (Afandi and Warijo, dalam Desrineltidkk, 2021)

Namun demikian kebijakan pencegahan *stunting* di Desa Pagaran Gala-Gala belum optimal karena kurangnya anggaran yang disediakan bagi pencegahan *stunting* sehingga mengalami kesulitan dalam pemberian makanan tambahan bagi bayi selain itu bayi balita yang terganggu pertumbuhannya kurang mendapatkan bantuan pangan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Begitu pula dengan hasil observasi penulis, terlihat bahwa kebijakan terhadap pencegahan *stunting* di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut : Pemerintah desa belum optimal dalam memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi anak-anak balita; Pemerintah desa belum optimal dalam memberikan asupan makanan bergizi kepada anak balita yang kekurangan gizi; Pemerintah desa kurang memberikan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan bagi bayi atau balita yang kekurangan gizi; Pemerintah desa kurang memberikan perhatian bagi perbaikan sanitasi hingga masyarakat mencapai 60 % yang membuang air besar kesungai; Pemerintah desa kurang dalam mengatasi sampah, sehingga masyarakat buang sampah sembarangan. Berdasarkan uraian



permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : "Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan *Stunting* Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan".

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini nantinya diharapkan mendapat deskripsi rinci kondisi empiris di lapangan tentang kebijakan pemerintah Desa Pagaran Gala-Gala terhadap pencegahan dan penurunan angka *stunting*. Sehingga informasi yang didapatkan komprehensif, faktual dan akurat. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif dari Miles & Huberman (2014) melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kemudian verifikasi dan penarikan kesimpulan. (Fina Aura Regita dan Ananta Prathama, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal tentang kebijakan Pemerintah Desa terhadap pencegahan *stunting* di Desa Pagaran Gala-Gala maka diperoleh hasil antara lain.

### Kebijakan Pemerintah Desa terhadap Pencegahan *Stunting* di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan.

Selanjutnya menurut Agustino (2016:137) menyatakan terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

#### 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik karena dengan dilakukannya komunikasi yang baik maka implementator akan dapat secara konsisten melaksanakan setiap kebijakan. Untuk mengukur keberhasilan komunikasi antara lain :

- a. Transmisi/penyaluran informasi
- b. Kejelasan dalam menyampaikan informasi
- c. Konsistensi dalam memberikan perintah

#### 2. Sumber daya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya dalam organisasi. Adapun indikator sumber daya meliputi :

- a. Adanya dukungan pegawai yang memadai serta memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan.
- b. Adanya informasi terkait cara melaksanakan kebijakan
- c. Adanya wewenang yang jelas kepada pelaksana kebijakan
- d. Adanya dukungan fasilitas yang memadai bagi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

#### 3. Disposisi

Disposisi adalah sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan berupa tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan. Sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan antara lain :

- a. Adanya kesesuaian dalam penentuan pegawai yang melaksanakan kebijakan
- b. adanya pembagian kerja sesuai dengan kemampuan pegawai
- c. adanya pemberian insentif sebagai motivasi bagi pelaksana kebijakan

#### 4. Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya struktur birokrasi yang dapat meningkatkan kerjasama dan suasana kondusif di dalam lingkungan kerja.

- a. Adanya SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan
- b. adanya standar kerja bagi pelaksana kebijakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari
- c. Adanya pembagian tanggungjawab kepada masing-masing petugas pelaksana untuk memudahkan implementasi kebijakan.

Keempat variabel yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan dijadikan pedoman bagi penulis dalam melakukan analisis terkait dengan kebijakan pencegahan *stunting* oleh pemerintah Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.



Adapun kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa Pagaran Gala-Gala dalam melakukan Pencegahan *stunting* antara lain memberikan asupan giji kepada balita dan ibu hamil. Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa dan bekerja sama dengan posyandu Desa Pagaran Gala-Gala. Pemberian asupan giji yang dilakukan berupa makanan-makanan yang mengandung nilai giji cukup tinggi, antara lain membagikan telur rebus dan bubur kacang ijo. Kegiatan tersebut dilakukan satu kali dalam satu bulan namun tidak rutin.

Selain hal tersebut pemerintah desa melakukan sosialisasi, pembinaan dan juga mengarahkan masyarakat agar berperilaku hidup sehat, dengan memperhatikan kebersihan pekarangan rumah, memperbaiki sanitasi, tidak membuang sampah sembarangan dan berbagai pola hidup sehat lainnya.

Kemudian pemerintah desa memberikan himbauan kepada masyarakat baik dalam bentuk selebaran yang dibagikan, ditempel pada papan pengumuman dan pada kelompok-kelompok masyarakat bahkan di warung kopi tentang mengatur pola makan yang bergizi dan pola hidup sehat. Bentuk himbauan yang dibuat juga disertakan didalamnya tempat-tempat untuk konsultasi seperti di posyandu dan Kantor Kepala Desa.

Kondisi sanitasi di Desa Pagaran Gala-Gala cukup memperhatikan karena mayoritas penduduk masih membuang kotoran ke sungai, seperti buang air besar dan buang air kecil, air sungai tersebut dipergunakan juga untuk mandi dan mencuci pakaian. Dan berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa bahwa 60% penduduk masih buang air ke sungai, dan sebahagian masyarakat pun membuang sampah disungai. Pemerintah desa sesungguhnya telah melarang masyarakat untuk melakukan hal tersebut akan tetapi tidak ada tempat lain selain kesungai, karena kurangnya fasilitas umum, seperti sanitasi untuk umum, tempat pembuangan sampah dan rumah masyarakat umumnya minim sanitasi.

Padahal sanitasi sangat berperan dalam pencegahan *stunting*, Menurut Cahyono dkk (2016) dalam kasus dimana sanitasi lingkungan berperan dalam penentu faktor *stunting* baik sebagai predisposisi (yang memulai) dan penyebab langsung gangguan perkembangan anak. Niswatul & Marjan (2020), menekankan mengenai kebersihan lingkungan dan rendahnya sanitasi bisa menyebabkan gangguan pencernaan, yang membuat pertumbuhan teralihkan pada perlawanan tubuh yang infeksi. Sugianti (2020) berpendapat bahwa terbatasnya aksesibilitas pangan dan buruknya sanitasi menyebabkan ketidakberlanjutan praktek-praktek kebersihan yang dipelajari selama program.

Dan perbaikan sanitasi di Desa Pagaran Gala-Gala sejak *covid 19* melanda indonesia tidak ada sama sekali. Pemerintah Desa beralasan bahwa anggaran desa diprioritaskan untuk penanganan *covid 19*. Oleh sebab itulah sanitasi di Desa Pagaran Gala-Gala tidak ada perbaikan dan yang sudah ada cenderung mengalami kerusakan.

Selanjutnya anggaran yang dipergunakan untuk *stunting* tidak terlalu signifikan dalam pencegahan *stunting* sebab anggaran yang tersedia hanya dipergunakan pada sebatas sosialisasi dan pemberian makanan tambahan bergiji kepada masyarakat dan jumlahnya pun tidak terlalu signifika, untungnya ada koordinasi dengan Pos Yandu sehingga pembagian makan bergiji dapat dilakukan dari pemberian petugas Pos Yandu.

Adapun koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam melakukan pencegahan terhadap *stunting* yaitu koordinasi dengan posyandu, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat melalui sosialisasi dan imunisasi rutin.

### **Hambatan Dalam melakukan Pencegahan *Stunting* di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan.**

Adapun hambatan dalam melakukan pencegahan *stunting* di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal antarlain disebabkan:

1. Bencana *Covid 19* yang melanda Indonesia tidak terkecuali Mandailing Natal.

Corona Viruses Disease 19 atau yang disingkat dengan COVID 19 telah menjadi bencana bagi dunia sejak Tahun 2019. COVID 19 yang berasal dari Wuhan, China ini telah memakan banyak korban dan merusak tatanan dalam segala aspek kehidupan mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, hingga pemerintahan. (Ismali,2021) sejalan dengan hal tersebut dengan adanya bencana covid 19 berpengaruh pada minimnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pagaran Gala-Gala dalam pencegahan *stunting*, karena prioritas anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa adalah penanganan covid 19 sehingga penanganan dan pencegahan *stunting* juga persoalan yang perlu diperhatikan karena akan berdampak panjang bagi kehidupan masyarakat Desa Pagaran Gala-Gala.

2. Minimnya Kebijakan pencegahan *stunting* dari pemerintah desa .



Pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memiliki luaran berupa aksi, aktivitas, mekanisme dan tindakan yang di bingkai dalam sebuah sistem (Ramdhani and Ramdhani, 2017). Pelaksanaan kebijakan dapat juga diartikan sebagai sebuah aktivitas yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan dilandasi dengan acuan norma yang disesuaikan untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang disepakati (Afandi and Warjio, 2015).

Kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan pemerintah Desa Pagaran Gala-Gala, dimana kebijakan pemerintah Desa Pagaran Gala-Gala dalam melakukan penangan dan pencegahan *stunting* sangat minim, sejauh ini kebijakan yang dilakukan dalam pencegahan *stunting* yaitu pembagian makanan tambahan kepada masyarakat dan sosialisasi dan hal tersebutpun karena dikerjakan secara bersama dengan Pos Yandu, selebihnya tidak terdapat tindakan aksi, aktivitas, mekanisme dan ketegasan dari pemerintah desa yang signifikan dalam melakukan pencegahan *stunting*.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.

Kesadaran masyarakat Desa Pagaran Gala-Gala cukup rendah dalam melakukan pencegahan *stunting*, hal tersebut terlihat dari masyarakat menjaga pola makanan yang bergizi, selain dari pada itu masyarakat tidak begitu peduli dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Sehingga tidak heran di Desa Pagaran Gala-Gala banyak masyarakat yang membuang sampah sembarang dan sanitasi yang tidak memadai membuat masyarakat membuang air besar di sungai dan menggunakan air tersebut juga untuk mandi dan mencuci.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Desa terhadap pencegahan *stunting* di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan, tidak terlalu signifikan karena kebijakan yang dilakukan yaitu pembagian makanan tambahan bagi balita dan sosialisasi pencegahan *stunting*, selebihnya tidak terlihat strategi serta aksi yang sistematis dalam melakukan pencegahan *stunting*.
2. Hambatan dalam melakukan pencegahan *stunting* di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan, antara lain :Bencana *Covid 19* yang melanda Indonesia tidak terkecuali Mandailing Natal, Minimnya Kebijakan pencegahan *stunting* dari pemerintah desa, dan Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.

### SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Pagaran Gala-Gala supaya memiliki aksi, aktivitas, mekanisme dan tindakan yang di bingkai dalam sebuah sistem dalam melakukan pencegahan *stunting*.
2. Membuat aturan serta tindakan tegas bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
3. Kepada masyarakat supaya meningkatkan kesadaran dan berperilaku bersih dan menjaga pola hidup sehat setiap hari.

### DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, M. I., & Warjio, W, 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat)*. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 5(2), 132-153.
- Anggara, S, 2015. *Metode Penelitian Administrasi (B. A. Saebani (ed.))*. Pustaka Setia.
- Agustino, Leo., 2017,. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Cahyono, F., Manongga, S. P., & Picaully, I. (2016). Faktor Penentu *Stunting* Anak Balita pada Berbagai Zona Ekosistem di Kabupaten Kupang. *Jurnal Gizi Pangan*, 11(1), 9–18. <https://doi.org/10.25182/jgp.2016.11.1.%25p>
- Coryanata, I, 2011. *Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah*.



Journal of Accounting and Investment.

- Desrinelti Desrinelti<sup>1\*</sup>), Magfirah Afifah<sup>1</sup> , Nurhizrah Gistituati<sup>1</sup>, 2021, Kebijakan publik: konsep pelaksanaan, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic), Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 83-88 DOI: <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Fina Aura Regita, Ananta Prathama, 2023, *Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi*, Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial, Vol. 12 No 1 April 2023, Hal 27 - 40 P\_ ISSN: 2252-603X, e\_ISSN: 2354-7693 <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>.
- Ismail, 2021, *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Tanggap Bencana Covid-19*, Jurnal Konstituen n Vol. 3, No. 2, Agustus 2021:93–106 p-ISSN 2656-2383 e-ISSN 2656-0925
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J., 2014,. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. SAGE Publications.
- Niswatul, M., & Marjan, W. (2020). Hubungan Kondisi Lingkungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Rt 08 , 13 dan 14 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang 2019. *Borneo Student Research*, 1(2), 750–754.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Puji Lestari, Fitri Pralistami, Dewi Ratna, Siti Hamijah, Reni Agustina Harahap, 2022, *Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 2227-2230 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jjubj.v22i3.2789.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A, 2017, *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. Jurnal Publik.
- Sirajuddin, I. A. ,2016, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik.
- Supariasa, 2012. *Penilaian Status Gizi*. EGC. Jakarta.
- Sugianti, E. (2020). Evaluasi Program Perbaikan Gizi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pos Gizi di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 14(2), 113–128. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.355>